

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah memberikan wewenang ataupun keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerahnya sendiri khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, sekaligus kewajiban Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Daerahnya sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan adanya sedikit bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola pemerintahan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di daerah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Pemerintah Daerah dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai

dengan kebutuhan dan potensi daerah, hal ini mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan Daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikan kekayaan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam era otonomi\daerah dewasa ini pengelolaan keuangan daerah dirumuskan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan Daerah. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Pengukuran atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah pada masa yang akan datang, dan juga untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Laporan keuangan dalam hal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program atau kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi pembiayaan.

Menurut Mardiasmo (2002:123), kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada anggaran yang telah dibuat daerah dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang dianggarkan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran sehingga nantinya dapat dihasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah

tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan menggunakan system keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. LRA juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang.

Kabupaten Manggarai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai pada 17 Juli 2007. Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten yang menyelenggarakan otonomi daerah, namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahnya masih belum optimal. Padahal, semenjak diberlakukan kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Manggarai Timur memikul suatu tugas untuk memberikan suatu inovasi didalam sistem pemerintahan kearah yang lebih baik. Berikut dapat dilihat data Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2016-2019 pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016-2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		Tahun Anggaran 2017		Tahun Anggaran 2018		Tahun Anggaran 2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4	Pendapatan Daerah	857,757,348,858.00	862,639,611,622.00	934,957,641,753.11	857,351,696,568.70	1,036,686,513,346.73	974,160,217,436.37	1,131,986,354,460.00	1,114,414,468,007.57
4.1	Pendapatan Asli Daerah	42,521,026,917.00	44,112,085,695.00	90,052,919,940.00	26,247,555,618.59	49,507,713,692.00	32,814,717,337.37	61,755,394,345.00	54,434,713,523.57
4.2	Dana Perimbangan	697,452,517,722.00	691,737,352,809.00	697,928,220,734.00	683,546,191,414.00	766,627,462,330.00	764,510,441,819.00	1,007,999,833,010.00	1,006,573,721,531.00
4.3	Lain- lain Pendapatan yang Sah	117,783,804,219.00	126,790,173,118.00	146,976,501,079.11	147,557,949,536.11	220,551,337,324.73	176,835,058,280.00	62,231,127,105.00	53,406,032,953.00
5	Belanja Daerah	913,432,793,116.47	856,581,882,122.00	987,499,317,512.68	862,227,698,862.00	1,074,838,174,803.11	972,631,282,579.03	1,162,228,417,918.72	852,507,132,865.10
5.1	Belanja Langsung	421,414,044,323.00	396,174,945,689.00	486,511,496,144.00	378,984,432,447.00	499,542,760,099.99	409,035,620,888.03	504,070,623,252.06	579,124,545,411.00
5.2	Belanja Tidak Langsung	492,018,748,793.47	460,406,936,433.00	500,987,821,368.68	483,243,266,415.00	575,295,414,703.12	563,595,661,691.00	301,155,055,088.67	273,777,797,528.72
	Surplus/ Defisit	(55,675,444,258.47)	6,057,729,500.00	(52,541,675,759.57)	(4,876,002,293.30)	(38,151,661,456.38)	1,528,934,857.34	(30,242,063,450.72)	6,000,793,980.47
6	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan	68,175,444,258.47	66,122,068,257.47	62,541,675,759.57	62,329,797,425.57	49,151,661,456.38	48,310,744,783.38	41,242,053,450.72	40,615,280,105.83
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12,500,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00	10,750,000,000.00	11,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Pembiayaan Neto	55,675,444,258.47	56,122,068,257.47	52,541,675,759.57	52,329,797,425.57	38,151,661,456.38	37,560,744,783.38	30,242,063,450.72	30,615,280,105.83
	SILPA	-	62,179,797,757.47	-	47,453,795,132.27	-	39,089,679,640.72	-	36,675,074,006.30
Sumber: Badan Keuangan Daerah, Provinsi NTT, Tahun 2020, Data Diolah									

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur masih fluktuatif. Realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 862,639,611,622.00, kemudian menurun pada tahun 2017 sebesar Rp. 857,351,696,568.70 dan pada tahun 2018 realisasi pendapatannya meningkat sebesar Rp. 974,160,217,436.37. Pada bagian belanja daerah, total realisasi belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016 adalah sebesar Rp. 856,581,882,122.00 kemudian tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 862,227,698,862.00 dan pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 972,631,282,579.03. Sedangkan pada pembiayaan daerah bagian penerimaan daerah pada tahun 2016 total realisasinya sebesar Rp. 66,122,068,257.47, tahun 2017 realisasinya sebesar Rp. 62,329,797,425.57 dan tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 48,310,744,783.38. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 realisasinya sebesar Rp. 10,000,000,000.00, pada tahun 2017 sebesar Rp. 10,000,000,000.00, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 10,750,000,000.00.

Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/pendapatan terbesar dari Kabupaten Manggarai Timur adalah dana perimbangan dari Pemerintah pusat dimana pada tahun 2016 dana perimbangannya sebesar Rp. 691,737,352,809.00, pada tahun 2017 sebesar Rp. 683,546,191,414.00 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 764,510,441,819.00. Sedangkan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur rendah dan jauh dari total dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dimana pada tahun 2016 PAD Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp. 44,112,085,695.00, tahun 2017 menurun sebesar Rp. 26,247,555,618.59, menurunnya pendapatan asli daerah dikarenakan menurunnya penerimaan dari

sektor pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2016 ke 2017. Padahal, harus ada peningkatan pendapatan asli daerah tiap tahunnya. Peningkatan pendapatan asli daerah terkait langsung dengan bagaimana Pemerintah Daerah member layanan publik yang semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pada tataran ini, pendapatan asli daerah harus dipahami sebagai perwujudan dari kemampuan ekonomi masyarakat, semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat, maka semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam membayar layanan publik yang disediakan pemerintah dalam hal ini membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2018 PAD meningkat sebesar Rp. 33,438,166,941.84 dikarenakan meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan pada bagian belanja daerah dari tahun 2016-2019, terlihat bahwa anggaran belanja tidak langsung lebih besar dari anggaran belanja langsung. Padahal, porsi belanja langsung yang ideal adalah 70% dan belanja tidak langsung sebesar 30%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengamanatkan agar rencana alokasi belanja lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja langsung) dari pada kepentingan aparatur (belanja tidak langsung). Selain itu, dari tahun 2016–2019 dapat dilihat pula bahwa realisasi belanja langsung lebih kecil dibandingkan anggarannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut “Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, agar memperbaiki Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan menjadi referensi bagi penulis lain dalam melakukan penelitian sejenis.